

DAFTAR ISI

Halaman sampul luar.....	i
Halaman sampul dalam.....	ii
Halaman persetujuan.....	iii
Halaman pengesahan.....	iv
Pernyataan keaslian.....	v
Motto.....	vi
Persembahan.....	vii
Kata pengantar.....	viii
Pedoman transliterasi arab-latin.....	xi
Daftar lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvi
Daftar isi.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan masalah.....	7
D. Signifikansi penelitian.....	7
E. Penegasan istilah.....	8
F. Penelitian terdahulu.....	10
G. Metode penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Demokrasi.....	17
1. Pengertian demokrasi	17
2. Manfaat demokrasi.....	19
3. Ciri-ciri sistem demokrasi.....	20
4. Nilai-nilai demokrasi.....	21
5. Prinsip demokrasi.....	23
6. Jenis-jenis demokrasi	25
7. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia.....	28
B. Pemilihan umum.....	33
1. Pengertian pemilihan umum	33
2. Perkembangan pemilihan umum.....	35
3. Sistem pemilihan umum.....	36
4. Kegiatan-kegiatan pemilihan umum	42
5. Fungsi pemilihan umum.....	44
6. Ciri-ciri pemilu demokrasi	46
C. Pemilihan kepala daerah.....	49
D. Pemilu dalam ketatanegaraan islam	54
E. Prinsip-prinsip ketatanegaraan islam yang berhubungan denganpemilu	58
1. Prinsip musyawarah	58
2. Prinsip keadilan	60
3. Prinsip persamaan	61

4. Prinsip kejujuran	62
5. Prinsip pertanggungjawaban	63
6. Prinsip kebebasan	64
7. Prinsip kebajikan	65

**BAB III SUBSTANSI PASAL 70 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
PILKADA NO. 10 TAHUN 2016 DAN BERBAGAI
ATURAN PERUBAHANNYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POLITIK DI INDONESIA**

A. Sejarah pilkada di Indonesia	67
1. Pilkada pada zaman Belanda.....	67
2. Pilkada pada zaman Jepang.....	70
3. Pilkada pada zaman kemerdekaan	72
B. Latar belakang pembentukan undang-undang pilkada No. 10 Tahun 2016	75
C. Analisis undang-undang pilkada No. 10 Tahun 2016	76
1. Problematika pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah <i>incumbent</i> dalam undang- undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota	76
2. Kelebihan dan kelemahan adanya penganturan persyaratan Cuti kampanye bagi kepala daerah <i>incumbent</i> dalam pilkada.....	81

**BAB IV SUBSTANSI PASAL 70 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
PILKADA NO. 10 TAHUN 2016 DAN BERBAGAI
ATURAN PERUBAHANNYA DALAM HUKUM
ISLAM**

A. Sistem pemilu dalam islam	91
B. Pandangan hukum islam terhadap sistem pemilu dalam Undang-UndangPilkada pasal 7 ayat (3) No. 10 Tahun 2016 tentang cuti kampanye bagi kepala daerah <i>incumbent</i> dalam pilkada	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN